

Laporan Konferensi

Oleh Manuela Kropp, Manager Proyek, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Belgia

Konferensi web: Baterai berkelanjutan untuk kendaraan listrik? Undang-undang uji tuntas Eropa dan kebijakan perdagangan UE – diselenggarakan pada 2 Juni 2021

Anda dapat menemukan video konferensi berbahasa Indonesia di sini:

www.youtube.com/watch?v=s8J58q4jzXM

Video versi Bahasa Inggris:

www.youtube.com/watch?v=kIM8DnObhkg

Versi Bahasa Jerman:

www.youtube.com/watch?v=ndHbDrPMTRI

Kesepakatan Hijau Eropa yang dipresentasikan pada Desember 2019 telah mendorong diskusi UE tentang solusi mobilitas yang bersih. Kendaraan listrik bertenaga baterai dianggap sebagai kendaraan 'ramah lingkungan' yang melibatkan emisi rendah untuk wilayah lokal mereka.

Namun, jelas bahwa produksi mobil listrik, baterainya, dan ekstraksi bahan mentah seperti litium dan nikel menghasilkan jejak ekologis yang signifikan.

Menurut Komisi Eropa, untuk baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi, UE akan membutuhkan hingga 18 kali lebih banyak litium daripada pasokan saat ini di seluruh UE pada tahun 2030, dengan peningkatan hampir 60 kali lipat pada tahun 2050.

Litium untuk memproduksi baterai kendaraan listrik sebagian besar berasal dari Amerika Latin dan menyumbang 50 persen dari produksi global. Salah satu masalah yang signifikan adalah dampak negatif dari ekstraksi air pada ekosistem kering di dekat pegunungan Andes.

Saat ini sumber utama nikel, salah satu bahan baku utama baterai listrik, adalah Indonesia, negara di mana eksploitasi sosial dan lingkungan tampak besar, khususnya bahaya pencemaran udara dan air laut. Mengingat permintaan yang terus meningkat, Indonesia merasakan peluang untuk membantu industrinya melakukan terobosan. Pemerintah Indonesia tidak lagi ingin hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi mengolah logam yang banyak diminati di dalam negeri.

Pada 10 Maret 2021, Parlemen Eropa menyerukan agar undang-undang uji tuntas Uni Eropa yang mengikat terkait dengan rantai pasokan disahkan sebagai hal yang mendesak untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab dan bisa



diandalkan jika mereka gagal untuk menaati, atau jika mereka ikut melakukan kerugian yang berdampak pada hak asasi manusia, lingkungan dan tata pemerintahan yang baik. Hal ini juga harus menjamin bahwa korban memiliki akses ke pemulihan hukum. Komisi Eropa telah mengumumkan bahwa mereka akan menyajikan proposal legislatifnya dalam hal ini pada akhir tahun ini.

Perjanjian perdagangan yang direncanakan antara UE dan MERCOSUR akan berdampak signifikan pada kondisi di sekitar penambangan, pengolahan, dan perdagangan bahan mentah, seperti litium di Argentina. Misalnya, sejumlah tindakan dari pemerintah nasional yang bertujuan membatasi ekspor akan terancam jika perjanjian perdagangan UE-MERCOSUR mulai berlaku.

Masalah-masalah penting ini dibahas pada konferensi oleh dan dengan para pembicara sebagai berikut:

Helmut Scholz, anggota Parlemen Eropa – Kelompok The Left; **Melisa Argento**, Universitas Buenos Aires (Argentina); **Pius Ginting**, AEER (Indonesia); **Risdianto**, Persatuan Independen Morowali (Indonesia).

Helmut Scholz menekankan pentingnya keberlanjutan dan kepatuhan terhadap standar lingkungan dalam penambangan bahan baku baterai, terutama mengingat permintaan nikel dan litium yang berkembang pesat. Dia mengatakan bahwa, meskipun sebuah studi yang dilakukan oleh Club of Rome berjudul *The Limits to Growth* telah diterbitkan kembali pada tahun 1972, perusahaan-perusahaan di industri otomotif dan energi, selama beberapa dekade ini, terus menyangkal perubahan iklim – dan bahwa kapitalisme keuangan makin memperburuk situasi bencana iklim. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok telah mengumumkan Kesepakatan Hijau yang seharusnya membawa transformasi ekologis, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana hal ini dapat dicapai tanpa adanya pembatasan pada produksi industri atau mobilitas. Perusahaan-perusahaan dan negara-negara industri sedang sembrono dan bersikap kolonialis dalam menuntut akses ke bahan mentah yang dibutuhkan untuk transformasi semacam itu. Negara-negara industri sedang menuntut hak mereka atas bahan mentah ini, dengan Uni Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat berlomba-lomba untuk mendapatkan akses terbaik. Misalnya, Komisi Eropa baru saja mengajukan klaim terhadap Indonesia kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk larangan ekspor nikel yang diberlakukan oleh pemerintah negara itu. Tujuan pemerintah Indonesia di sini adalah untuk meningkatkan pangsa perusahaan Indonesia dalam rantai produksi – yang, menurut Helmut, jelas merupakan sikap kebijakan industri yang sepenuhnya sah di pihaknya. Ketika merundingkan perjanjian perdagangan bebas, negosiator Uni Eropa, misalnya, selalu berusaha menghindari pemungutan bea ekspor oleh mitra dagang. Hal tersebut untuk saat ini dapat dilihat, misalnya, dalam negosiasi antara UE dan Chili, dengan Komisi Eropa berpendapat bahwa akses ke litium di Chili sangat penting bagi UE, terutama dalam menghadapi persaingan dari Tiongkok. Semua hal ini membuatnya



semakin penting untuk mengesahkan undang-undang uji tuntas Eropa yang berkaitan dengan rantai pasokan, menempatkan fokus pada kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dan lingkungan, karena sesuatu harus dilakukan untuk meredam kecenderungan seperti-Demam Emas yang berlaku terhadap pertambangan sumber daya bahan mentah, misalnya untuk pembangunan turbin angin. Dengan demikian, perjanjian perdagangan UE-MERCOSUR kemungkinan besar akan memudahkan akses perusahaan-perusahaan Eropa ke bahan mentah di Argentina, Paraguay, Brasil, dan Uruguay serta meningkatkan eksploitasi berlebihan di tambang. Seluruh 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB harus dilaksanakan pada tahun 2030, dan UE tidak boleh mencapai tujuannya dengan mengorbankan wilayah dunia di bagian lain. Pandemi COVID-19 saja menunjukkan saling ketergantungan berbagai kawasan ini dan betapa pentingnya inisiatif global untuk kegiatan ekonomi hijau. Kemiskinan mempengaruhi sebagian besar penduduk dunia, sehingga penting untuk memastikan akses universal ke pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan dan pekerjaan yang layak. Ini juga menyiratkan bahwa Eropa tidak dapat mengharuskan seluruh dunia untuk menghentikan produksi, yang berarti bahwa pertumbuhan inklusif atau bahkan *degrowth* menjadi lebih penting. Helmut mengakhiri dengan menegaskan bahwa kemitraan baru antardaerah juga dapat membantu menggerakkan bagian-bagian ekonomi kita, yaitu dengan menghasilkan energi terbarukan dan hidrogen hijau.

Melisa Argento dari Universitas Buenos Aires (Argentina) menjelaskan bahwa banyak bagian dari Segitiga Litium (Argentina, Bolivia, dan Chili) hidup dari pariwisata dan juga pertambangan. Kelompok penduduk dan masyarakat yang terkena dampak penambangan litium, telah lama menyoroti dampak ekologis negatifnya dan telah melihat hak-hak mereka dilanggar: tidak ada konsultasi yang diadakan dengan penduduk setempat sebelum dimulainya penambangan tersebut, yang telah menyebabkan salinisasi air tawar lebih lanjut. Strategi penambangan yang agresif untuk komponen kendaraan listrik dan sektor elektronik telah menjadi masalah selama bertahun-tahun, tetapi sekarang apa yang hanya dapat digambarkan sebagai 'demam litium' telah pecah, menghasilkan penambangan bahan mentah ini sepenuhnya tanpa batas. Badan Energi Internasional telah menghitung bahwa permintaan litium telah meroket dengan faktor 42 dalam beberapa tahun terakhir. Di Argentina, hampir tidak ada pembatasan atas ekspor litium, sebab politisi di tingkat nasional memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas untuk regulasi karena memberlakukan pembatasan tersebut adalah tanggung jawab provinsi negara tersebut. Namun, ada tekanan kuat dari perusahaan internasional untuk mengizinkan ekspor litium tanpa batas. Sayangnya, belum ada studi yang memadai yang mendokumentasikan kerusakan akuifer dan ekosistem secara bertahap namun berkelanjutan, dan keseimbangannya yang rapuh. Limbah dari penambangan litium menimbulkan masalah yang serupa, dan tingginya biaya pemulihan lanskap setelah penambangan menimbulkan beban tambahan, seperti halnya partikulat yang dilepaskan ke atmosfer, yang membahayakan kesehatan



penduduk setempat. Sayangnya, dampak kesehatan yang lebih spesifik belum diselidiki. Mempertimbangkan semua masalah ini, penilaian kritis penambangan litium untuk baterai listrik semakin dibutuhkan. Pendekatan penting ini juga harus dilakukan pada dasar pemikiran 'kapitalisme hijau untuk transisi hijau', serta peralihan ke mobilitas, karena bagi banyak komunitas lokal, situasinya sekarang dapat disimpulkan dengan kata-kata 'Air lebih berharga daripada litium'. Sebaliknya, perusahaan yang bersangkutan harus menjalankan tanggung jawab sosial mereka, karena masyarakat pedesaan yang terkena dampak, yang tinggal jauh dari pusat kota, berada di bawah kekuasaan perusahaan pertambangan dan memiliki sedikit kesempatan untuk menuntut hak-hak sosial mereka. Harus ada kepatuhan terhadap legislasi yang sudah ada, pengetatan peraturan yang ada dan perluasan hak konsultasi penduduk, dengan pertimbangan khusus diberikan pada hak-hak masyarakat adat di tingkat lokal, regional dan nasional. Selain itu, harus diambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa lebih banyak rantai nilai yang terkait dengan pertambangan harus tetap dilakukan secara lokal, yaitu di negara-negara terkait, dengan mengolah bahan baku di dalam negeri. Selanjutnya, pendapatan yang dihasilkan harus didistribusikan di antara masyarakat lokal yang terkena dampak pertambangan. Mengalihkan perhatiannya ke perjanjian perdagangan bebas UE-MERCOSUR yang direncanakan, Melisa menjelaskan bahwa ini akan lebih meningkatkan tekanan untuk pertambangan dan semakin banyak mobil yang akan diimpor dari UE ke negara-negara MERCOSUR. Pandemi saat ini menunjukkan bahwa yang sebenarnya kita butuhkan adalah kebijakan perdagangan yang dilandasi rantai nilai secara lokal dan mengarah pada dekonsentrasi produksi.

Pius Ginting dari AEER (Indonesia) mengacu pada dua publikasi Rosa-Luxemburg-Stiftung yang relevan tentang pertambangan nikel: *Road to Ruin* (dari Oktober 2019) dan *Fast and Furious for Future* (dari April 2021) (lihat www.rosalux.de/en/profile/es_detail/AJ2ZM3GU9L/pius-ginting?cHash=1124cda3b03b01c8e6b502e56b9a056e (dalam Bahasa Inggris)).

Ia menegaskan, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku dan pasti bisa meningkatkan kapasitas produksi baterai sendiri. Namun, hal ini memerlukan kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan dan standar sosial saat menambang dan mengolah nikel. Peralihan ke mobilitas elektronik akan berdampak besar bagi Indonesia, karena negara ini merupakan rumah bagi 25 persen penyimpanan nikel dunia. Yang menjadi masalah di sini adalah pembuangan sisa-sisa bijih (*tailing*) yang timbul dari produksi nikel, karena selama ini hanya dibuang ke laut, yang dapat membahayakan, misalnya, terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang luar biasa di kawasan ini. Oleh karena itu, pengelolaan *tailing* yang bijaksana diperlukan untuk mencegah dampak tersebut. Selain itu, *tailing* mengancam komunitas nelayan setempat, ditunjukkan dengan fakta bahwa persediaan perikanan sudah menurun dan mereka yang bekerja di sektor ini terpaksa pergi semakin jauh ke lepas pantai untuk menangkap ikan. Ada rencana untuk segera membangun salah satu pabrik pengolahan nikel terbesar di komunitas nelayan



ini– sesuatu yang akan berdampak pada setiap aspek kehidupan penduduk setempat. Taman Industri Morowali telah mengubah warna laut yang sebelumnya biru jernih menjadi cokelat. Selain itu, peningkatan produksi nikel mengancam kawasan hutan lindung, sehingga merusak mata pencarian masyarakat adat. Masalah produksi energi juga penting di sini: pembangkit listrik tenaga batu bara sejauh ini telah digunakan untuk produksi dan pengolahan nikel, dan pembangkit listrik tenaga batu bara baru sedang direncanakan. Masyarakat sudah merasakan dampak kesehatannya, dengan peningkatan penyakit pernapasan yang signifikan sejak tahun 2019. Oleh karena itu, sangat penting untuk beralih ke sumber energi terbarukan. Dalam perkembangan yang disambut baik, sebuah perusahaan Tiongkok sekarang berencana untuk menggunakan energi angin dan matahari untuk mendayai Taman Industri Morowali, tetapi ada juga kebutuhan untuk memberikan status perlindungan wilayah laut ini, dan penanganan *tailing* di wilayah pertambangan tempat produksinya, karena hanya membuang residu ini di daratan – sementara ini juga memiliki risiko – lebih baik daripada melakukannya di laut. Pius mengakhiri dengan mengatakan bahwa kebutuhan untuk melindungi mata pencarian berbasis laut dan darat sangat penting bagi orang-orang yang terlalu tua untuk bekerja di sektor pertambangan.

Risdianto dari Morowali Persatuan Independen (Indonesia) menyatakan bahwa Morowali kini menjadi tolok ukur untuk sistem produksi baterai masa depan. Industri nikel, salah satu sektor paling penting di dunia, saat ini mengalami peningkatan besar dari peralihan ke mobilitas elektronik. Pemerintah Indonesia mendukung industri ini dengan program-program yang tepat sasaran, tetapi para pekerja tidak menikmati manfaat apa pun dari segi kesejahteraan mereka – malah sebaliknya, karena ada banyak masalah dengan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Singkatnya, bekerja di pabrik ini sama sekali tidak aman. Pada tahun 2019, misalnya, tercatat lebih dari 1.100 kecelakaan, beberapa di antaranya bahkan berakibat fatal, namun belum ada perbaikan dalam keselamatan kerja. Pengolahan nikel berdampak negatif bagi manusia baik di dalam maupun di luar pabrik: di dalam, pekerja terpapar partikel halus dan abu, sementara di luar, pembangkit listrik tenaga batu bara juga mencemari atmosfer. Masker pernapasan yang disediakan untuk pekerja tidak memiliki filter yang sesuai, artinya abu dapat langsung masuk ke paru-paru mereka sehingga tidak ada yang bisa bekerja di sana selama lebih dari tujuh hingga sembilan tahun. Serikat pekerja juga secara khusus mengumpulkan data tentang ini. Selain itu, makanan yang diberikan kepada pekerja berkualitas buruk, yang menimbulkan risiko kesehatan lebih lanjut. Perusahaan juga menggunakan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk memperpanjang jam kerja di luar batas undang-undang selama 40 jam per minggu. Hal tersebut dan tekanan untuk bekerja lembur tanpa dibayar melanggar hukum Indonesia. Mengingat tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, para pekerja terpaksa menyerah pada tekanan ini. Hal ini menyebabkan semakin pentingnya bagi masyarakat internasional untuk mendukung serikat pekerja Indonesia dalam perjuangan mereka.

